



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER

LAPORAN EVALUASI RENJA TRIWULAN I

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Laporan Evaluasi Renja Triwulan I ini merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban kepada Pedoman Evaluasi Rencana Kerja dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser termasuk peran serta Non ASN yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Paser pada umumnya.

Demikian Laporan Evaluasi Renja Triwulan I Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini disusun sebagai instrument dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolak ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana kegiatan, evaluasi hasil akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

..

Tana Paser, 6 April 2026
Sekretaris Daerah,



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Maksud dan Tujuan Laporan	
A.1. Maksud Laporan	4
A.2. Tujuan Laporan	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8
D. Isu Strategis	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : CAPAIAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN	
A. Anggaran Belanja Kegiatan	11
B. Realisasi anggaran	12
BAB III : EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA SETDA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Faktor Penghambat	22
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Saran – Saran	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, khususnya pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
2. untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap hasil yang direncanakan.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
4. Menemukan alternatif pemecahan masalah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang akan dilaksanakan pada triwulan atau semester berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan Renja dapat dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja selanjutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah:

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. Penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser terdiri dari:

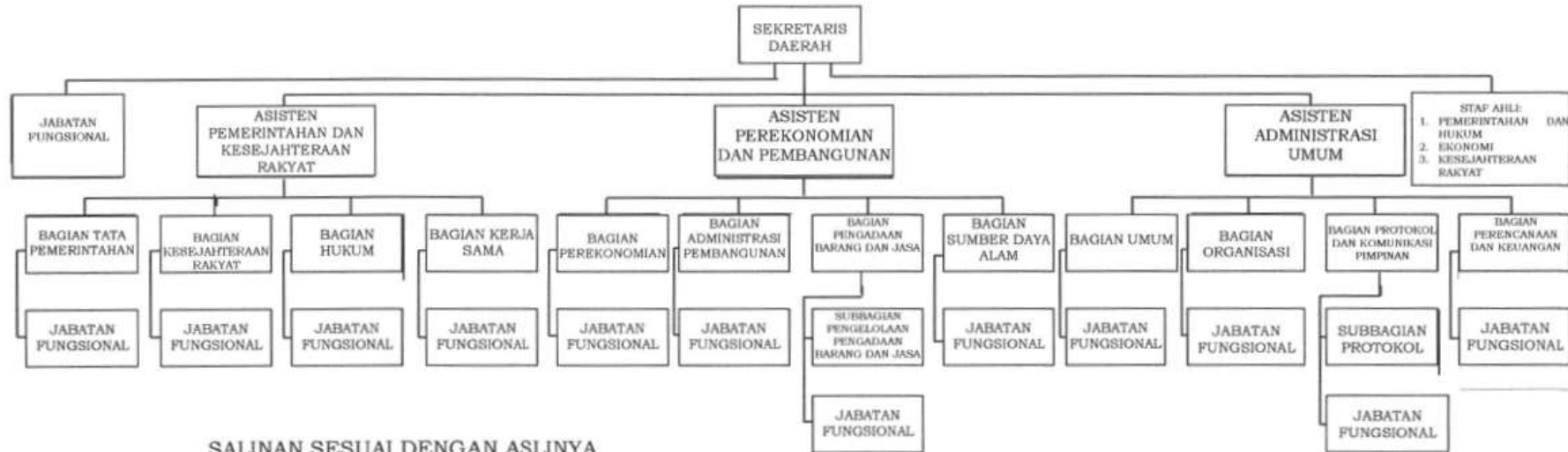
- a. *Sekretaris Daerah;*
- b. *Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :*
 1. *Bagian Tata Pemerintahan*
 2. *Bagian Kesejahteraan Rakyat*
 3. *Bagian Hukum*
 4. *Bagian Kerja Sama*
- c. *Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :*
 1. *Bagian Perekonomian*
 2. *Bagian Administrasi Pembangunan*
 3. *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
 4. *Bagian Sumber Daya Alam*

d. Asisten Administrasi Umum yang membawahi :

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASERP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASERP


ANDI AZIS
NIP 19680816 199603 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAMI FADLI

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan *perumusan perencanaan yang berkualitas*. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam *Penunjang Urusan Pemerintahan*.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, dan akar masalah, serta hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel I
Tabel Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
A	Bagian Organisasi		
1	Masihnya belum optimalnya kualitas layanan yang merata serta masih minimnya inovasi publik .	Pelayanan publik belum terstandar secara optimal dan belum sepenuhnya focus pada tingkat kepuasan masyarakat	1. Belum semua perangkat daerah memiliki SP sesuai kebutuhan organisasi dan dijalankan secara konsisten 2. Pengukuran kepuasan masyarakat masih terbatas dan belum menjadi bahan utama perbaikan layblik 3. Masih rendahnya inovasi layblik dilevel perangkat daerah

2	Masih belum optimalnya implemantasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah maupun Perangkat Daerah	Manajemen Kinerja Sistem Akutabilitas Kinerja baik aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja belum terbangun secara optimal	1. Masih terdapat pada sebagian perangkat daerah perencanaanya masih belum berorientasi hasil 2. Masih terdapat indikator kinerja yang luring spesifik dan terukur 3. Terdapat pada sebagian Pelaporan kinerja perngkat daerah belum mendalam dan belum menginformasikan kinerja yang sesungguhnya 4. Belum optimalnya perangkat daerah dalam mengevaluasi atas capaian maupun kegagalan disertai langkah langkah perbaikan Kapasitas SDM masih terbatas baik
3	Prosedur dan proses bisnis organisasi masih bersifat manual, dan belum terstandarisasi secara menyeluruh	SOP masih banyak yang belum diperbaharui , proses bisnis belum terbangun dengan baik, dan pemanfaatan teknologi informasi belum merata antar perangkat daerah	1. SOP belum sesuai kebutuhan organisasi dan belum diperbaharui secara berkala 2. Lemahnya koordinasi antar bidang dalam penyederhanaan proses bisnis pelayanan public 3. Impelementasi SPBE belum terintegrasi secara menyeluruh dan merata

4	Implementasi Birokrasi belum memberikan dampak optimal capaian indikator makro pembangunan dan perubahan budaya kerja	Reformasi birokrasi berjalan belum terkoordinasi optimal dan berkelanjutan	1. rb belum diinternalisasi sebagai transformasi, melainkan masih cenderung rutinitas administrasi 2. hasil evaluasi belum sepenuhnya dipedomani dalam perencanaan dan penganggaran 3. upaya pencapaian kinerja melalui skema kolaboratif belum optimal
5	Kelembagaan belum tertata secara optimal	Belum optimalnya penataan struktur organisasi perangkat daerah yang proporsional, adaptif serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah	1. Struktur organisasi belum sebanding dengan beban kerja actual 2. Beberapa unit kerja masih terdapat tumpang tindih fungsi 3. Belum optimal Kelembagaan penunjang dalam bentuk UPTD
		Penataan organisasi belum adaptif terhadap pendekatan birokrasi berbasis hasil	Struktur organisasi masih berorientasi pada hirarki bukan pada output kinerja
6	Masih belum optimalnya kesesuaian jumlah dan kompetensi jabatan dengan kebutuhan organisasi	Belum optimalnya analisis formasi jabatan yang berbasis tugas dan fungsi organisasi secara actual dan kebutuhan riil	1. Analisis jabatan masih belum akurat 2. Analisis beban kerja belum menyeluruh 3. Adanya kesenjangan struktur dengan ketersediaan SDM 4. Masih lemahnya koordinasi antar unit /pd terkait dalam merumuskan formasi berbasis kebutuhan nyata

7	Budaya kerja ASN belum mencerminkan nilai BERAKHLAK skedara merata dan belum sepenuh mendukung terwujudnya birokrasi yang responsif, tanggap dan inovatif	Masih belum terbangunnya disiplin secara menyeluruh, masih rendahnya inovasi dan masih belum optimalnya kolaborasi antar pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik	1. nilai ASN Dan core values berakhlak belum dinternalisasi secara mendalam 2. lingkungan kerja belum mendukung budaya kerja yang produktif dan sehat 3. budaya kerja belum terintegrasi dalam system manajemen kinerja dan reformasi birokrasi
B	Bagian Tata Pemerintahan		
1	LPPD	Belum optimalnya capaian LPPD Kabupaten Paser	Belum memadai Pemahaman OPD terhadap Penyusunan dokumen LPPD Belum optimalnya pembinaan LPPD di OPD
2	Segmen Batas Wilayah Kab/Kota	Belum maksimal pencapaian penyelesaian Batas Wilayah kabupaten dan kecamatan	Terhambatnya proses penyelesaian segmen batas wilayah kabupaten dan kecamatan masih adanya konflik antar batas wilayah Belum efektifnya koordinasi dalam penanga batas wilayah
3	Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Rendahnya Pencapaian Urusan SPM	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Belum Optimal
C	Bagian Administrasi Pembangunan		
1	Administrasi pelaksanaan pembangunan belum standar	pembangunan dalam fasilitasi penyusunan program pembangunan Belum optimalnya proses pengadministrasian pembangunan dalam evaluasi dan pengendalian program pembangunan	prosedur (SOP) fasilitasi penyusunan program pembangunan. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan belum terstruktur Kapasitas SDM dalam penyusunan program masih terbatas Ketersediaan data dasar perencanaan belum lengkap atau belum mutakhir Belum adanya Dasar Hukum terkait tentang tatacara pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengendalian program pembangunan

			Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian belum berjalan efektif.		
			Kapasitas SDM pelaksana di bagian Administrasi Pembangunan dalam analisis evaluasi dan pengendalian masih terbatas		
			Sistem informasi pengendalian dan evaluasi belum optimal digunakan		
			Belum adanya tim evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD terkait		
		Belum optimalnya proses pengadministrasian pembangunan dalam pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Belum adanya standar baku atau pedoman teknis evaluasi dan pelaporan pembangunan		
			Kapasitas SDM dalam evaluasi dan pelaporan pembangunan masih terbatas		
			Sistem informasi evaluasi dan pelaporan belum optimal dimanfaatkan		
			Umpan balik hasil evaluasi belum terintegrasi dalam siklus perencanaan berikutnya		
		C	Bagian Hukum		
		1	Pengelolaan Produk Hukum	Banyaknya Kebutuhan terhadap Produk hukum yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu	Masih rendahnya kapasitas / kompetensi sumber daya manusia aparatur Bagian Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan. Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan

			perundang-undangan.
			Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan
			Lemahnya pengumpulan / penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan;
			Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
			Pemetaan peraturan perundang-undangan daerah yang ada
		Pedampingan hukum bagi ASN dan masyarakat miskin	Pembinaan dan pendampingan hukum belum efektif
			Masih lemahnya koordinasi hukum dengan aparat hukum
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum
D	Bagian Kesra		
1	Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum Optimalnya Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Basis data penerima manfaat belum akurat dan mutakhir
			Koordinasi lintas OPD belum berjalan efektif
			Kapasitas SDM pelaksana program masih terbatas
			Perencanaan program tidak berbasis kebutuhan nyata
			Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan
E	Pengadaan Barang/Jasa		
1	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang belum efektif	Belum efektifnya Proses Lelang pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang dan jasa

			Masih lemahnya pelaksanaan tahapan tahapan proses pengadaan barang dan jasa
		Pemenuhan kompetensi bagi JF PPBJ belum optimal	Jumlah SDM fungsional pengelola barang dan jasa masih kurang
			Belum memadainya jumlah JF pengelola pengadaan barang dan jasa
			Pemenuhan JF PPBJ hanya melalui jalur CPNS, PPPK dan perpindahan jabatan
			Belum Mengikuti sertifikasi dasar /level 1 dan sertifikasi kompetensi JF PPBJ
		Pemenuhan data Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum memadai	Belum memadainya pemenuhan data untuk RUP, TEPR, TKDN, dan SPSE
		Belum optimalnya Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik	Masih terdapat Proses Pengadaan langsung manual di luar sistem
G	Bagian Umum		
1	Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang, dan rencana pemeliharaan barang di Sekretariat Daerah	Kurangnya pembinaan analisis perencanaan barang di Sekretariat Daerah
			Belum tersedianya database BMD yang memadai dan terintegrasi
			Manajemen asset di lingkup Setda belum tertata dengan baik
2	Dukungan Teknis dan Pelayanan Umum	Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum	Pelaksanaan SOP masih belum optimal
			Dukungan budaya kerja dalam hal sense of belong belum memadai
			Masih rendahnya kualitas layanan persuratan
			Masih belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian sekretariat daerah
			Masih lemahnya

			koordinasi antar Bagian dalam dukungan layanan umum bagi kegiatan pimpinan daerah
H	Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan		
1	Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Belum optimalnya kualitas layanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan daerah	Pelaksanaan Keprotokolan belum sepenuhnya berdasarkan SOP dan standar pelayanan Responsifitas isu publik yang berkaitan dengan pimpinan daerah masih belum optimal Kapasitas SDM dalam pelaksanaan protokoler dan komunikasi pimpinan masih terbatas pimpinan masih terbatas Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar bagian dan OPD dalam penyediaan data sebagai bahan bagi pimpinan Masih belum tertatanya dokumentasi dan inventarisasi data dan informasi pimpinan
I	Bagian kerjasama		
1	Belum efektifnya kerjasama daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah	Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar daerah	Kemampuan SDM Kurang memadai Masih lemahnya pemahaman tentang kerjasama daerah oleh OPD Masih sedikitnya nota kerjasama yang telah disepakati untuk ditindalanjuti Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pusat dan daerah dalam kerjasama luar negeri Masih rendahnya kualitas evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kerjasama
J	Bagian Perekonomian		

1	koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian daerah belum berjalan efektif.	Belum optimalnya fasilitasi dan layanan administratif bidang perekonomian dalam mendorong ekonomi daerah pertumbuhan	Belum optimalnya SDM di bagian ekonomi dalam menghasilkan perumusan kebijakan dan analisis ekonomi daerah
			Belum optimalnya pengkoordinasian lintas perangkat daerah terkait bidang perekonomian
			Belum efektifnya pengelolaan data bidang perekonomian
			Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan Bidang Perekonomian
K	Bagian Sumber Daya Alam		
1	pengelolaan Sumber daya Alam berkelanjutan	Belum optimalnya efektifitas pemantauan pengelolaan Sumber Daya berkelanjutan	Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah yang terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
			Kurangnya data yang akurat dan komprehensif tentang SDA
			Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan lingkungan hidup, energi dan air
			Belum optimalnya perumusan kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
			Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan SDA berkelanjutan
			Kurangnya SDM yang berkompeten
L	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
1	Perencanaan dan anggaran sekretariat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja	Kualitas dokumen perencanaan masih belum optimal	Kapasitas SDM dalam penyusunan perencanaan masih terbatas

			Masih lemahnya koordinasi antar bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan di SETDA
		Efisiensi dan efektif pengelolaan anggaran belum optimal	efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masing masing bagian belum optimal
			Ketepatan dalam pemenuhan data dukung kelengkapan atas pelaksanaan anggaran belum memadai

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (UNRESOLVED MATTERS) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Daerah Nomor 09 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Paser dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai berikut:

ISU ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Dalam menjalankan tugas fungsinya masih Menghadapi permasalahan yang bersifat strategis/isu Strategis yaitu Belum Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Koordinasi Kebijakan, Fasilitasi Administratif, dan Layanan Dukungan terhadap Kepala Daerah dengan beberapa kondisi yaitu:

- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan akuntabel
- Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Evaluasi Renja Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

Kata

Pengantar;

Daftar Isi;

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Capaian Target Penyerapan Anggaran Kegiatan

Menjelaskan tentang Capaian target kinerja penyerapan APBD Pada lingkup Sekretariat kabupaten paser;

Bab III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Menjelaskan tentang hasil Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Setda Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 terhadap Hasil kinerja perangkat daerah dan hambatan/kendala dalam pencapaian target kerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan Kesimpulan dan Saran.

BAB II**CAPAIAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN****A. Anggaran Belanja Kegiatan**

Belanja daerah tahun anggaran 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar Rp. 143.362.628.230,-.

Tabel 2.1
Uraian Anggaran Belanja Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Paser

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
	SEKRETARIAT DAERAH		143.362.628.230
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		33.918.188.748
		1 Administrasi Tata Pemerintahan	2.394.244.229
		2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.400.579.178
		3 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.916.572.412
		4 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	206.792.929
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.955.782.077
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.410.444.092
		2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	184.218.222
		3 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	180.586.613
		4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	180.533.150
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		107.488.657.405
		1 Penataan Organisasi	346.871.752
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	746.518.220
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.206.358.049
		4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.891.858.952
		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.360.360.740
		6 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.188.136.000
		7 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.589.852.827
		8 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.994.394.698
		9 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	518.432.991
		10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.645.873.176

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 32.003.849.461,-** atau sebesar **22,32%** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 143.362.628.230,-**. Dengan demikian dapat dikatakan pada **Triwulan I Tahun Anggaran 2026 terdapat sisa pagu anggaran pada** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 111.358.778.769,-**.

Penyerapan anggaran pada triwulan I ini sebesar 22,32% atau hampir mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 25% dari anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak terealisasi sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat terserap untuk kegiatan tersebut. Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Triwulan I Tahun 2026 dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
Triwulan I Tahun Anggaran 2026**

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI S/D TRIWULAN I KEUANGAN 2026	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
	Sekretariat Daerah	Rp 143.362.628.230	Rp 32.003.849.461	22,32%	Rp 111.358.778.769
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.410.444.092	Rp 50.326.000	3,57%	Rp 1.360.118.092
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 184.218.222	Rp 96.395.305	52,33%	Rp 87.822.917
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 180.586.613	Rp 49.487.189	27,40%	Rp 131.099.424
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 180.533.150	Rp 62.098.315	34,40%	Rp 118.434.835
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 2.394.244.229	Rp 654.774.875	27,35%	Rp 1.739.469.354
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.400.579.178	Rp 339.459.036	24,24%	Rp 1.061.120.142
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 29.916.572.412	Rp 1.293.381.020	4,32%	Rp 28.623.191.392
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 206.792.929	Rp 48.272.632	23,34%	Rp 158.520.297
	Penataan Organisasi	Rp 346.871.752	Rp 44.705.271	12,89%	Rp 302.166.481
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 746.518.220	Rp 45.009.800	6,03%	Rp 701.508.420
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 16.206.358.049	Rp 4.338.660.003	26,77%	Rp 11.867.698.046
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 29.891.858.952	Rp 6.261.109.102	20,95%	Rp 23.630.749.850
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.360.360.740	Rp 2.037.997.700	32,04%	Rp 4.322.363.040
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 4.589.852.827	Rp 1.454.432.260	31,69%	Rp 3.135.420.567
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2.188.136.000	Rp 217.057.492	11,37%	Rp 1.971.078.508
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 3.994.394.698	Rp 978.434.787	24,50%	Rp 3.015.959.911
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp 518.432.991	Rp 147.086.678	28,37%	Rp 371.346.313

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI S/D TRIWULAN I KEUANGAN 2026	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
	Kinerja Perangkat Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 42.645.873.176	Rp 13.885.161.996	32,56%	Rp 28.760.711.180

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab IV mengenai rencana kinerja tahun 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, sebagian besar menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2026 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja dari seluruh bagian yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja Untuk Triwulan I

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 25\%$	Berhasil	Hijau
2	$20\% < 25\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$15\% < 20\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 15\%$	Tidak Berhasil	Merah

1. REALISASI KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Sekretariat Daerah, Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2026 indikator kinerja sasaran kegiatan beserta targetnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen 2. Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	85 % 80 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase temuan ditindaklanjuti 2. Persentase LHP nihil	85 % 20 %
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi	90 %
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	90 %

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	85 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	85 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	75 %
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	85 %
9	Penataan Organisasi	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100 %
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	85 %
11	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	80 %
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	85 %
14	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 %
15	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Aktifitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ	70 % 5,5 40
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana	85 %
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100 %
18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya ALam Yang Disusun	100 %

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh *Sekretariat Daerah Kabupaten Paser* dilakukan berdasarkan indikatifnya yaitu nilai Kinerja Sekretariat Daerah dan nilai LPPD. Kemudian untuk program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari capaian realisasinya yang dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran S/D Triwulan I Tahun Anggaran 2026

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Sekretariat Daerah			100%	143.362.628.230	20,17%	32.003.849.461	20,17%	22,32%	111.358.778.769
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	1.955.782.077		252.203.999		12,90%	1.703.578.078
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Aktifitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	70%	1.410.444.092		50.326.000		3,57%	1.360.188.092
		2. Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	5,5						
		3. Tingkat Kematangan UKPBJ	40						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana	85	184.218.222		96.395.305		52,33%	87.822.917
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100	180.586.613		49.487.189		27,40%	131.099.424
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber	100	180.533.150		62.098.315		34,40%	118.434.835

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Daya Alam Yang Disusun							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Kinerja Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	33.918.188.748		2.335.887.563		6,89%	31.582.301.185
	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	2.394.244.229		654.774.875		27,35%	1.739.469.354
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	85	1.400.579.178		339.459.036		24,24%	1.061.120.142
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	80	29.916.572.412		1.293.381.020		4,32%	28.623.191.392
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	50	206.792.929		48.272.632		23.34%	158.520.297
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Kinerja Manajemen Internal	70	107.488.657.405		26.763.213.057		24,90%	80.725.444.348
	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	346.871.752		44.705.271		12,89%	302.166.481
	Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Umum	90	746.518.220		45.009.800		6,03%	701.508.420

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang terpenuhi							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	85	16.206.358.049		4.338.660.003		26,77%	11.867.698.046
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	85	29.891.858.952		6.261.109.102		20,95%	23.630.749.850
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	75	6.360.360.740		2.037.997.700		32,04%	4.322.363.040
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	85	4.589.852.827		1.454.432.260		31,69%	3.135.420.567
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	90	2.188.136.000		217.057.492		9,92%	724.117.508
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	85	3.994.394.698		978.434.787		24,50%	3.015.959.911

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat	85	518.432.991		147.086.678		28,37%	371.346.313
		2. Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	80						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase temuan ditindaklanjuti	85	42.645.873.176		13.885.161.996		32,56%	28.760.711.180
		2. Persentase LHP nihil	20						

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja sebagaimana tersaji pada table 3.3 dapat dinyatakan bahwa capaian realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun 2026 dinyatakan **“Cukup Berhasil”** dengan nilai capaian realisasi kinerja sebesar **22,20%**.

B. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Hambatan dan kendala dalam capaian target kinerja yang telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 terdapat beberapa factor pendorong dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut. Adapun faktor pendorongnya adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen Pimpinan : Adanya pengawasan dan pengendalian internal kepada seluruh ASN dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dari Sekretariat Daerah.
- b. Koordinasi yang solid : keberhasilan Sub Bagian yang realisasinya 25%atau lebih menunjukan komitmen yang kuat sebagai ASN dalam bekerja secara profesional dan bertanggung jawab serta mampu bersinergi dalam team maupun antar bagian sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.
- c. Digitalisasi Administrasi : penggunaan sistem informasi dalam layanan administrasi umum mendorong peningkatan indeks kepuasan karena proses menjadi lebih cepat dan transparan.

Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

- a. Padatnya beban kerja di beberapa sub bagian sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak selesai.
- b. Kekurangan SDM yang memadai dan berkompeten.
- c. Alokasi anggaran yang belum sesuai karena adanya efisiensi
- d. Kepala Bagian belum memahami formulasi perhitungan indikator kinerjanya sehingga tidak dapat menghitung capaian realisasi kinerjanya

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2026, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2025 – 2029.

Dari hasil analisis capaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I tahun 2026 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2026 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis kegiatan berada pada kategori **Cukup Berhasil dengan** nilai rata – rata **22,20%**.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.32.003.849.461,- atau sebesar 22,32%** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 143.362.628.230,-**. Dengan demikian dapat dikatakan pada **Triwulan I Tahun Anggaran 2026 terdapat sisa pagu anggaran pada** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 111.358.778.769,-**.
3. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2026 masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian realisasi Program dan Kegiatan, namun demikian secara umum Program dan Kegiatan berhasil dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. SARAN-SARAN

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi serta mengacu pada hasil pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran, maka disampaikan beberapa saran sebagai alternatif solusi sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh stakeholder untuk meningkatkan kualitas kinerja pada Sekretariat Daerah.
2. Memanage waktu secara efektif dan efisien agar dapat melaksanakan semua pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaannya.
3. Mengagendakan kegiatan sosialisasi penghitungan formulasi indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Formulir E.61 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Periode Pelaksanaan : 2025																		
No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai Kinerja Internal	90	225,411,128,160	0	Rp777,220,400	70	Rp107,400,657,405	0	Rp 29,409,655,009	0	Rp29,409,655,009	0	Rp 30,106,075,409	0.00%	13.39%	Bagian Perencanaan & Keuangan
			Persentase ketepatan cakupan pengusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	95	5,647,560,620	0	Rp	85	Rp 516,432,991	0	Rp 147,006,676	0	Rp 147,006,676	-	Rp 147,006,676	0.00%	2.60%	
			Persentase ketercediaan data kinerja perangkat daerah	95				90										
		Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3,047,392,000	-		6	Rp 251,371,576	2	Rp 56,809,778	2	Rp 56,809,778	2	Rp 56,809,778	33.33%	1.86%		
		Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	4	375,000,000	-		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-	Rp -	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	712,594,410	-		5	Rp 85,362,703	2	Rp 12,504,703	2	Rp 12,504,703	2	Rp 12,504,703	50.00%	1.77%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	800,000,000	-		5	Rp 133,486,268	1	Rp 49,943,617	1	Rp 49,943,617	1	Rp 49,943,617	25.00%	6.12%		
		Pengusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	12	712,594,410	-		12	Rp 40,212,442	3	Rp 20,740,500	3	Rp 20,740,500	3	Rp 20,740,500	25.00%	4.03%		
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	96	226,588,571,474	-	Rp	85	Rp 42,645,873,176	0	Rp13,885,161,996	0	Rp 13,885,161,996	-	Rp 13,885,161,996	0.00%	6.13%		
		Persentase LHP	40				20											
		Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	4270	219,773,846,374	-		4242	Rp 42,026,392,873	953	Rp 13,760,736,596	953	Rp 13,760,736,596	953	Rp 13,760,736,596	22.32%	6.26%		
		Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	1,645,364,000	-		12	Rp 67,579,285	1	Rp 6,590,000	1	Rp 329,192,800	1	Rp 329,192,800	1.67%	20.00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800	4,943,429,100	-		725	Rp 536,304,792	123	Rp 117,835,400	123	Rp 117,835,400	123	Rp 117,835,400	15.38%	2.38%		
		Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	225,332,000	-		2	Rp 15,596,226	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0.00%	0.00%		
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	98	11,609,680,000	-	Rp	90	Rp 2,188,136,000	0	Rp217,057,492	0	Rp 217,057,492	0	Rp 217,057,492	0.00%	1.87%		
		Pengadaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20	1,500,000,000	-		20	Rp 300,000,000	6	Rp 61,182,492	6	Rp 61,182,492	6	Rp 61,182,492	2143%	4.08%		
		Pengadaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	5,609,680,000	-		10	Rp 986,136,000	0	Rp 41,175,000	0	Rp 41,175,000	-	Rp 41,175,000	0.00%	0.73%		
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	1,500,000,000	-		8	Rp 300,000,000	0	Rp -	0	Rp -	-	Rp -	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	3,000,000,000	-		24	Rp 600,000,000	6	Rp 114,700,000	6	Rp 114,700,000	6	Rp 114,700,000	25.00%	3.82%		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang	98	3,880,000,000	-	Rp	-	90	Rp	746,516,220	0	Rp	45,009,800	0	Rp	45,009,800	0	Rp	45,009,800	0.00%	1.16%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	17	1,025,000,000	-	-	-	12	Rp	456,547,500	3	Rp	45,009,800	3	Rp	45,009,800	3	Rp	45,009,800	17.65%	2.47%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190	2,055,000,000	-	-	-	190	Rp	289,970,720	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0.00%	0.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan	95	54,644,045,230	-	Rp	-	85	Rp	16,206,358,043	0	Rp	4,338,660,003	0	Rp	4,338,660,003	0	Rp	4,338,660,003	0.00%	7.94%
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	425,000,000	-	-	-	16	Rp	189,226,500	0	Rp	37,701,300	0	Rp	37,701,300	0	Rp	37,701,300	0.00%	9.67%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12,250,000,000	-	-	-	17	Rp	4,649,024,339	0	Rp	1,931,698,904	0	Rp	1,931,698,904	0	Rp	1,931,698,904	0.00%	14.58%
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4,250,000,000	-	-	-	25	Rp	1,850,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0.00%	0.00%
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1,400,000,000	-	-	-	30	Rp	166,951,210	0	Rp	96,627,720	0	Rp	96,627,720	0	Rp	96,627,720	0.00%	6.90%
Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	235,000,000	-	-	-	9	Rp	63,310,000	0	Rp	42,000,000	0	Rp	42,000,000	0	Rp	42,000,000	0.00%	17.87%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	23,385,937,750	-	-	-	150	Rp	6,000,000,000	40	Rp	1,271,025,022	40	Rp	1,271,025,022	40	Rp	1,271,025,022	333.33%	5.43%
Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	11,263,107,480	-	-	-	12	Rp	3,159,946,000	3	Rp	959,607,057	3	Rp	959,607,057	3	Rp	959,607,057	25.00%	9.52%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	425,000,000	-	-	-	10	Rp	108,000,000	3	Rp	-	3	Rp	-	3	Rp	-	5.00%	0.00%
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Jasa Penunjang Pemerintahan yang	95	46,776,904,473	-	Rp	-	85	Rp	29,891,858,952	0	Rp	6,261,109,102	0	Rp	6,261,109,102	0	Rp	6,261,109,102	0.00%	13.39%
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	11,281,650,200	-	-	-	12	Rp	6,416,744,541	3	Rp	1,208,132,775	3	Rp	1,208,132,775	3	Rp	1,208,132,775	25.00%	10.71%
Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	18,297,686,900	-	-	-	5	Rp	13,786,220,655	0	Rp	2,632,988,056	0	Rp	2,632,988,056	0	Rp	2,632,988,056	0.00%	17.21%
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	20,197,567,373	-	-	-	12	Rp	9,688,893,756	0	Rp	2,419,988,271	0	Rp	2,419,988,271	0	Rp	2,419,988,271	0.00%	11.98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90	21,761,371,000	-	Rp	-	75	Rp	6,360,360,740	0	Rp	2,037,997,700	0	Rp	2,037,997,700	0	Rp	2,037,997,700	0.00%	9.37%
Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	3,700,360,500	-	-	-	3	Rp	593,390,600	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	20	5,840,827,300	-	-	-	20	Rp	877,715,400	0	Rp	18,202,200	0	Rp	18,202,200	0	Rp	18,202,200	0.00%	0.33%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	12,220,183,200	-	-	-	3	Rp	4,883,254,740	0	Rp	2,018,795,500	0	Rp	2,018,795,500	0	Rp	2,018,795,500	0.00%	16.52%
Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	93	15,247,385,000	-	Rp	-	85	Rp	4,589,852,827	0	Rp	1,454,432,260	0	Rp	1,454,432,260	-	Rp	1,454,432,260	0.00%	9.54%
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	60	6,718,500,000	-	-	-	12	Rp	2,200,000,000	3	Rp	745,391,480	3	Rp	745,391,480	3	Rp	745,391,480	5.00%	11.09%
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	5,528,895,000	-	-	-	12	Rp	1,902,771,676	3	Rp	560,425,340	3	Rp	560,425,340	3	Rp	560,425,340	5.00%	10.14%
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang	60	3,000,000,000	-	-	-	12	Rp	487,081,151	3	Rp	148,615,440	3	Rp	148,615,440	3	Rp	148,615,440	5.00%	4.95%
PENATAAN ORGANISASI	Persentase efektivitas tatakelola	100	7,096,089,195	0	Rp	-	100	Rp	346,871,752	0	Rp	44,705,271	0	Rp	44,705,271	0	Rp	44,705,271	0.00%	0.63%

Bagian Umum

	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60	2,029,162,705	-	-	12	Rp	119,481,762	2	Rp	19,260,511	2	Rp	19,260,511	2	Rp	19,260,511	3.33%	0.95%	Bagian Organisasi	
	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40	2,543,933,650	-	-	9	Rp	94,610,000	1	Rp	4,160,000	1	Rp	4,160,000	1	Rp	4,160,000	2.50%	0.16%		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	30	1,075,485,000	-	-	6	Rp	56,680,000	1	Rp	-	1	Rp	-	1	Rp	-	3.33%	0.00%		
	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	399,265,000	-	-	4	Rp	20,006,000	1	Rp	650,000	1	Rp	650,000	1	Rp	650,000	5.00%	0.16%		
	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	40	1,049,352,840	-	-	8	Rp	56,094,000	4	Rp	20,634,760	4	Rp	20,634,760	4	Rp	20,634,760	10.00%	1.97%	Bagian Protokol	
	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai	95	21,465,521,649	0	Rp	-	85	Rp3,994,394,698	0	Rp	978,434,787	0	Rp	978,434,787	0	Rp	978,434,787	0.00%	4.56%		
	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Acara yang terlaksana	12	10,494,427,830	-	-	12	Rp	1,588,014,860	3	Rp	250,410,700	3	Rp	250,410,700	3	Rp	250,410,700	25.00%	2.39%		
	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Facilitasi Komunikasi Pimpinan	12	5,491,940,130	-	-	12	Rp	1,243,271,604	3	Rp	277,622,100	3	Rp	277,622,100	3	Rp	277,622,100	25.00%	5.06%		
	Pendokumentasian Tugas	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan	12	5,479,153,689	-	-	12	Rp	1,163,108,234	3	Rp	450,401,987	3	Rp	450,401,987	3	Rp	450,401,987	25.00%	9.22%		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan	95	104,401,209,383	106	Rp0	100	Rp33,918,188,748	0	Rp2,335,887,563	0	Rp	2,335,887,563	106.37	Rp	2,335,887,563	193.08%	2.24%	Bagian Tata Pemerintahan		
Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Layanan Administrasi	100	9,311,550,955	0	Rp	-	100	Rp	2,394,244,229	0	Rp	654,774,875	0	Rp	654,774,875	0	Rp	654,774,875		0.00%	7.03%
Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	4,416,119,800	-	-	8	Rp	875,407,837	1	Rp	103,977,760	1	Rp	103,977,760	0	Rp	103,977,760	0.00%		2.35%	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	6	2,163,696,545	-	-	6	Rp	459,966,100	1	Rp	62,068,600	1	Rp	62,068,600	0	Rp	62,068,600	0.00%		2.87%	
Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	2,731,734,610	-	-	3	Rp	1,058,870,292	3	Rp	488,728,515	3	Rp	488,728,515	0	Rp	488,728,515	0.00%	17.89%		
Facilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang	95	4,556,848,045	0	Rp	-	85	Rp	1,400,579,178	0	Rp339,459,036	0	Rp	339,459,036	0	Rp	339,459,036	0.00%	7.45%		
Facilitasi Pengusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	905	1,512,008,740	-	-	900	Rp	388,262,892	201	Rp	44,454,200	201	Rp	44,454,200	201	Rp	44,454,200	22.21%	2.94%	Bagian Hukum	
Facilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum	3	2,148,021,705	-	-	4	Rp	301,921,143	1	Rp	295,004,836	1	Rp	295,004,836	1	Rp	295,004,836	33.33%	13.73%		
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	168	896,817,600	-	-	882	Rp	110,395,143	221	Rp	-	221	Rp	-	221	Rp	-	131.55%	0.00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan	100	88,340,263,038	0	Rp	-	80	Rp	29,916,572,412	0	Rp	1,293,381,020	0	Rp	1,293,381,020	0	Rp	1,293,381,020	0.00%		1.46%
Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	93	78,474,480,744	-	-	367	Rp	25,003,192,120	137	Rp	1,178,759,800	137	Rp	1,178,759,800	137	Rp	1,178,759,800	147.31%	1.50%			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	35	7,607,885,189	-	-	100	Rp	4,754,228,292	20	Rp	96,997,620	20	Rp	96,997,620	20	Rp	96,997,620	57.14%	1.27%			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	25	2,257,997,105	-	-	15	Rp	159,152,000	3	Rp	17,623,600	3	Rp	17,623,600	3	Rp	17,623,600	12.00%	0.78%		

	Facilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerja sama daerah yang difasilitasi dan didukung (lampir)	60	2.182.947.345	0	Rp	-	50	Rp	206.792.529	0	Rp	48.272.632	0	Rp	48.272.632	0	Rp	48.272.632	0.00%	2.28%		
	Facilitasi Kerja Sama Dalam Rangka	Jumlah Misi Kerja sama Daerah yang dilaksanakan	25	1.446.829.000	-	-	-	25	Rp	9.065.500	0	Rp	9.064.302	0	Rp	9.064.302	0	Rp	9.064.302	0.00%	1.32%	Bagian Kerjasama	
	Kebijakan Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Misi yang telah dilaksanakan	12	745.722.345	-	-	-	12	Rp	105.383.429	0	Rp	23.965.329	0	Rp	23.965.329	0	Rp	23.965.329	29.00%	3.92%		
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan dan Pemantauan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kinerja layanan Perencanaan dan Persentase aktivitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara Kuantitas dan Kompetensi SUM	75	24.740.743.187	0	Rp0	-	100	Rp	1.955.782.677	0	Rp	258.306.889	0	Rp	258.306.889	0	Rp	258.306.889	0.00%	1.04%		
			50	12.775.993.658	0	Rp	-	70	Rp	1.410.444.992	0	Rp	50.326.000	0	Rp	50.326.000	0	Rp	50.326.000	0.00%	0.33%		
			7,5																				
			40																				
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan	10	3.326.430.319	-	-	-	10	Rp	277.966.041	0	Rp	27.987.000	0	Rp	27.987.000	0	Rp	27.987.000	25.00%	0.7%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Elektronik	12	5.270.099.994	-	-	-	12	Rp	436.772.091	0	Rp	19.200.000	0	Rp	19.200.000	0	Rp	19.200.000	25.00%	0.36%	
		Pemantauan dan Adopsi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Adopsi Pengadaan Barang dan	20	3.685.474.395	-	-	-	20	Rp	642.006.000	0	Rp	3.239.000	0	Rp	3.239.000	0	Rp	3.239.000	0.00%	0.00%	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan	85	4.755.846.746	0	Rp	-	85	Rp	184.238.222	0	Rp	96.395.305	0	Rp	96.395.305	0	Rp	96.395.305	0.00%	2.83%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan BUKD dan SBUK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan BUKD	12	1.282.780.179	-	-	-	12	Rp	61.498.222	0	Rp	17.303.305	0	Rp	17.303.305	0	Rp	17.303.305	25.00%	1.33%	Bagian Perekonomian
		Pengelolaan dan Pemantauan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan (Zakaria)	12	1.388.397.575	-	-	-	12	Rp	61.496.000	0	Rp	30.387.305	0	Rp	30.387.305	0	Rp	30.387.305	25.00%	3.97%	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Monev Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pemantauan Elektronik (Monev) Hasil	12	1.347.722.980	-	-	-	12	Rp	61.496.000	0	Rp	28.304.395	0	Rp	28.304.395	0	Rp	28.304.395	25.00%	3.8%		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan BUKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan BUKD	1	428.166.600	-	-	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0.00%	0.00%		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan	125	428.166.600	-	-	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0.00%			
	Facilitasi Pengurusan Program Pembangunan	Persentase laporan monitoring pembangunan	100	3.563.385.274	0	Rp	-	100	Rp	180.586.613	0	Rp	45.487.189	0	Rp	45.487.189	0	Rp	45.487.189	0.00%	1.39%	Bagian Administrasi Pembangunan	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengurusan Program Pembangunan Daerah	12	1.809.621.700	-	-	-	2	Rp	46.116.357	0	Rp	16.791.318	0	Rp	16.791.318	0	Rp	16.791.318	0.00%	1.24%		
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60	1.819.595.795	-	-	-	12	Rp	58.450.318	3	Rp	8.584.471	3	Rp	8.584.471	3	Rp	8.584.471	5.00%	0.57%		
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	60	938.167.773	-	-	-	12	Rp	74.017.938	3	Rp	22.111.400	3	Rp	22.111.400	3	Rp	22.111.400	5.00%	4.11%		
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang	3	3.642.317.469	0	Rp	-	100	Rp	180.533.190	0	Rp	62.098.315	0	Rp	62.098.315	0	Rp	62.098.315	0.00%	1.70%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	16	1.155.888.200	-	-	-	16	Rp	68.284.240	4	Rp	18.274.300	4	Rp	18.274.300	4	Rp	18.274.300	25.00%	1.68%	Bagian Sumber Daya Alam	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Pertambangan, Statistik	12	1.099.509.900	-	-	-	12	Rp	56.049.070	3	Rp	20.686.763	3	Rp	20.686.763	3	Rp	20.686.763	25.00%	1.00%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Rakyat dan Kawasan	12	1.386.819.369	-	-	-	12	Rp	56.199.040	3	Rp	23.197.262	3	Rp	23.197.262	3	Rp	23.197.262	25.00%	1.67%		
Rata-rata capaian kinerja (%)										22.20%		Rp22,003,849,461	22.20%	Rp	22,003,849,461								
Predikat Kinerja																							

